



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS PERDAGANGAN
2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021. Akhirnya semoga LKIP Tahun anggaran 2021 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan Good Governance yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua. Amin Yaa Rabbal Aalamin

Rantau, 25 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Perdagangan



H.HERMANSYAH,S.HUT,MMA
NIP. 19700923 199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iv
Ikhtisar Eksekutif	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1. Kepala Dinas Perdagangan	2
2. Sekretaris Dinas Perdagangan	4
3. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan	6
4. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	7
5. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	8
6. Kelompok Jabatan Fungsional	10
7. Unit Pelaksana Teknis	10
B. Aspek Strategis Organisasi	11
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi	12
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	16
1. Tujuan	16
2. Sasaran Strategis	17
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama	18
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021	32
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan tahun 2019.....	52
3. Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah	54
4. Perbandingan dengan kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Selatan	55
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	56
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	65
B. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Sasaran Strategis, Target Dan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja	vii
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan.....	17
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2021 ..	19
Tabel 2.3	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2020	27
Tabel 3.1	Capaian Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2021	32
Tabel 3.1.1	Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan	34
Tabel 3.1.2	Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Pengembangan Saran Distribusi Perdagangan	40
Tabel 3.1.3	Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan.....	49
Tabel 3.2	Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan Tahun 2021	52
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra....	54
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.....	56
Tabel 3.5	Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya.....	63

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melaksanakan 7 program dengan 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.658.880.926,00 realisasi Rp. 7.621.108.220,00 (88,01%) dengan sumber dananya dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2021. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan, juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Baik**, dengan realisasi keuangan tidak mencapai 100%.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2021 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan khususnya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan

dalam menilai pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2021.

Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini ada kekurangan yang selalu kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Rincian capaian sasaran strategis dengan masing-masing indikator tiap sasaran dan target serta realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Sasaran Strategis, Target Dan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program
			Tahun 2021			
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	6%	-0,23%	-3,88%	a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11%	9.12%	82,90%	b. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	78 IKM	76,66 IKM	98,28	c. Program Pengembangan Ekspor
	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	81%	77,78%	96,02%	d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,5%	0,87%	142,33%	e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	50%	28%	56%	f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%	

BAB

I

PENDAHULUAN

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dalam jangka menengah (5 tahunan), Rencana Kerja (RENJA) tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama

LKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok "menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perdagangan". Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b) pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e) pengelolaan kesekretariatan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertugas untuk

memastikan bahwa semua aktivitas terkait urusan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis Bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan, Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan,;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan perizinan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Pengembangan perdagangan, Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

2. Sekretariat Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari :

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :** mempunyai tugas pembantuan mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha perdagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pelaku Usaha Pedagangan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perdagangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian

- pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan.

Unsur-unsur Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- b) Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan perdagangan; dan
- c) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan.

4. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrolgian dan pengawasan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Kemetrolgian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pengawasan Perdagangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian

- pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah;

Unsur-unsur Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Kemetrolagian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kemetrolagian; dan
- b) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengawasan Perdagangan.

5. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi

barang pokok dan penting.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian stabilitas barang pokok dan penting;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

Unsur-unsur Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :

- a) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
- c) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi stabilisasi barang pokok dan penting.

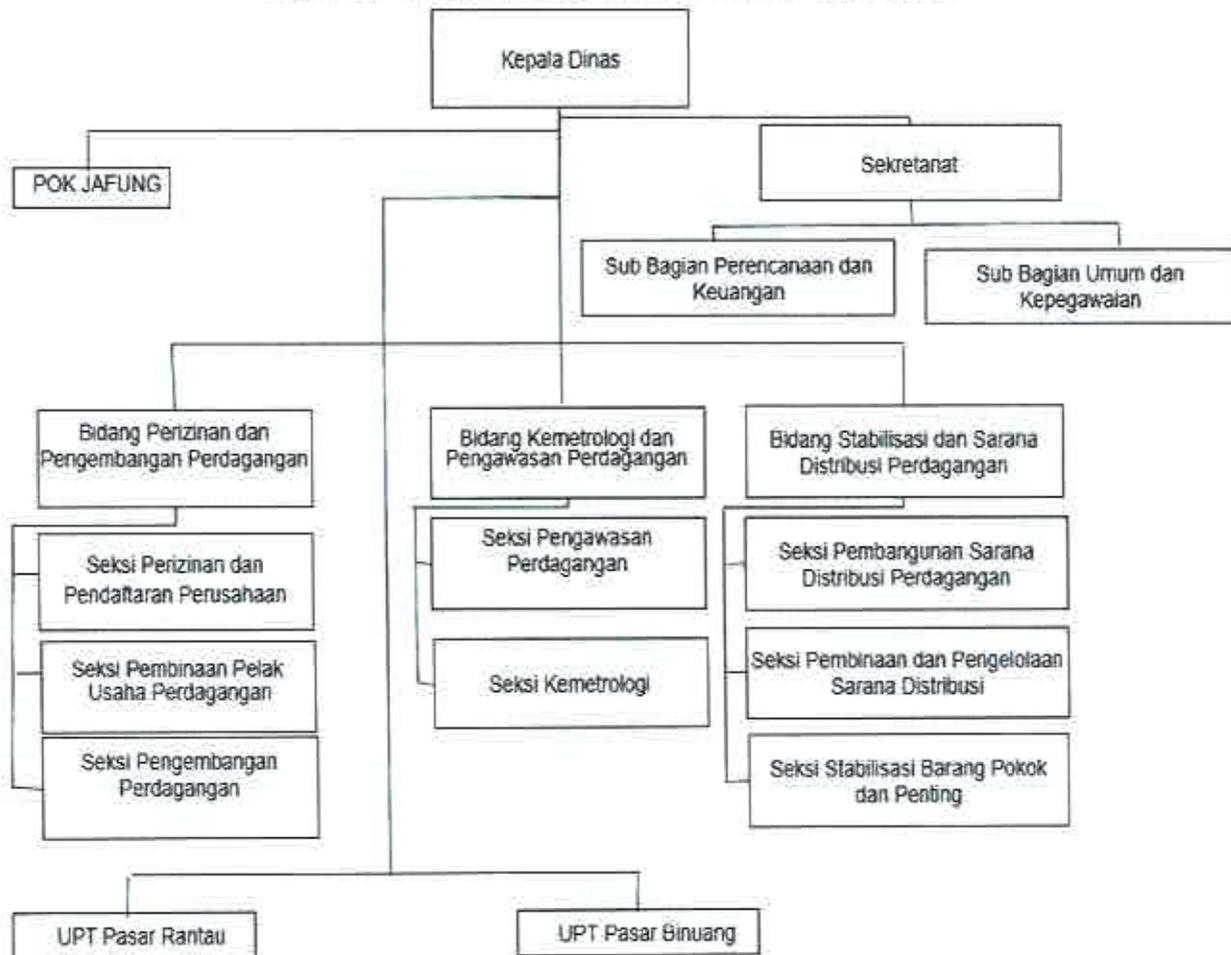
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Ketentuan tentang pembentukan UPT Dinas Perikanan beserta Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin menemukan potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan;

4. Peningkatan biaya operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan perdagangan;
6. Terbukanya pasar luar negeri merupakan peluang untuk memasarkan komoditi ekspor Kalimantan Selatan yang didukung oleh SDA yang ada.
7. Kecenderungan meningkatnya investasi dan meningkatnya SDM melalui pelatihan dan kelembagaan mendorong tumbuhnya industry yang kompetitif dan bersaing;
8. Adanya kebijakan dari pemerintah untuk perbaiki fasilitas sarana dan prasarana pasar daerah;
9. Mayoritas pelaku usaha perdagangan sudah mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan usahanya.

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM pelaksana yang berkualitas;
2. Masih lemahnya SDM Aparatur dalam memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Masih kurangnya operator komputer terampil di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta kurangnya pegawai pada Dinas Perdagangan Kab. Tapin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang;
4. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
5. Masih rendahnya pengembangan usaha pada sektor Perdagangan;
6. Masih beredarnya barang atau produk kadaluarsa yang tidak layak jual di Kabupaten Tapin;

7. Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan perdagangan di daerah;
8. Perlu dibangun UPTD Meterologi pengujian alat ukur takar timbang dan penyediaan aparatur penera.
9. Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Tapin.
10. Perlunya dirancang perda di bidang Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji;
11. Perlunya Percepatan pembangunan atau revitalisasi sarana dan pembinaan dibidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan;
12. Perlunya data dan informasi kepada pelaku usaha tentang wajib daftar perusahaan dan syarat-syaratnya.

Potensi dan permasalahan ini menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk tahun-tahun berikutnya.

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

NOMOR	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	71,26	BB
2	2019	72,76	BB
3	2020	73.68	BB

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, maka Dinas Perdagangan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2020 sebagai berikut:

NOMOR	SARAN/REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	Rencana aksi yang sudah dibuat agar dimonitoring dan evaluasi Secara berkala	Rencana Aksi dimonitoring dan evaluasi per triwulan
2	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dengan baik dalam rangka pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	Hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja setiap bidang
3	Membuat PK dan indikator kinerja sampai tingkat individu (staf)	PK dan Indikator Kinerja Individual dibuat sampai tingkat staf
4	Mengumpulkan data kinerja atas rencana aksi secara berkala	Data kinerja atas rencana aksi selalu diarsipkan
5	Agar dapat memudahkan untuk memantau kinerja perbidang dapat dibantu dengan teknologi informasi	Akan membuat teknologi informasi untuk memantau kinerja perbidang

6	Memberikan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Akan memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
7	Melaksanakan review IKU secara berkala	Membuat review IKU secara berkala
8	Memanfaatkan pengukuran kinerja atas rencana aksi untuk pengendalian pemantauan kinerja secara berkala	Monev Rencana Aksi dimanfaatkan untuk pemantauan kinerja per triwulan
9	Melaksanakan evaluasi program yang digunakan untuk menilai keberhasilan program	Program dievaluasi pencapaiannya secara berkala
10	Memperbaiki capaian kinerja secara keseluruhan	Akan berusaha selalu memperbaiki capaian kinerja

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Perdagangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya LPE Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan pelayanan sekretariat.

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran startegis adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat
2	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan, jika ditemukan ketidakberhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focus pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (data dukung pada lampiran). Uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dan penjelasan/perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2021

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan	
				Rumus Indikator	
Kepala Dinas (Esselon II)					
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Mengindikasikan Pertumbuhan Volume Perdagangan	Semakin tinggi pertumbuhan volume perdagangan akan mencapai sasaran strategis perekonomian Kab. Tapin	$G = \frac{\text{PDRB1} - \text{PDRB0}}{\text{PDRB0}} \times 100\%$ <p>G = Laju pertumbuhan volume perdagangan PDRB1 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n PDRB0 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n - 1</p>	
Esselon III					
Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Mengindikasikan peran sektor perdagangan terhadap PDRB	semakin besar peran sektor perdagangan akan memberikan kontribusi positif terhadap perdagangan PDRB	$\text{Sektor Ekonomi} = \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	
Esselon IV					
Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	Mengindikasikan banyaknya rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Semakin banyak rekomendasi izin usaha maka semakin meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perdagangan	$\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki rekomendasi izin usaha} \times 100\%$ <p>Jumlah pelaku usaha</p>	

Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan Jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif	Mengindikasikan persentase petani yang menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG)	Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) maka meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan dalam daerah	$G = \frac{\text{Jumlah Resi1} - \text{Jumlah Resi0}}{\text{Jumlah Resi0}} \times 100\%$ Jumlah Resi0 G = Pertumbuhan Jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif Jumlah Resi1 = Jumlah Resi pada tahun n Jumlah Resi0 = Jumlah Resi pada tahun n - 1
Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	Mengindikasikan banyaknya pelaku usaha yang dibina	Semakin banyak pelaku usaha yang dibina maka semakin meningkatnya tertib usaha	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang dibina}}{\text{Jumlah pelaku usaha}} \times 100\%$
Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	Jumlah Pameran yang diikuti untuk promosi produk lokal	pameran merupakan sarana untuk melakukan promosi	
	Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	Jumlah Jenis Produk lokal yang dipromosikan	Semakin banyak produk lokal yang dipromosikan makin besar peluang dikenal masyarakat	
	Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	Jumlah pelaku usaha Produk lokal yang dipromosikan	Semakin banyak pelaku usaha produk lokal yang dipromosikan makin besar peluang dikenal masyarakat	
Essen III				
Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	Hasil SKM menggambaran kepuasan pedagang	Mengetahui tingkat kepuasan pedagang atas pelayanan yang diberikan pemerintah	Hasil Survey Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	Mengindikasikan kondisi bangunan pasar yang layak	Bangunan pasar yang layak dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli	$\frac{\text{Jumlah bangunan pasar yang layak}}{\text{Jumlah bangunan pasar di kabupaten}} \times 100\%$

Bab II

Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	Variasi Harga barang pokok dan penting	Mengetahui tingkat kenaikan harga barang pokok dan penting	Rata-rata Variasi Harga
Esselon IV				
Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki ki	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun maupun diperbaiki	pemeliharaan dan pembangunan pasar bisa meningkatkan kelayakan pasar	
Terlaksananya Keamanan, Keterliban dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	Melakukan pengawasan terhadap kehadiran petugas keamanan dilingkungan pasar	Dengan adanya pengawasan kehadiran petugas keamanan maka semakin teraturnya jadwal petugas keamanan	
	Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	Melakukan pengawasan terhadap kehadiran petugas Kebersihan dilingkungan pasar	Dengan adanya pengawasan kehadiran petugas Kebersihan maka semakin teraturnya jadwal petugas keamanan	
Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Menyajikan Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Tertibnya data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung	

Bab II

Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Memberikan informasi banyaknya hari yang digunakan dalam monitoring harga	Laporan Informasi Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting yang disajikan dan diupdate setiap harinya diharapkan dapat memberikan informasi terkini bagi masyarakat	Jumlah hari laporan informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting x 100 % Jumlah Target hari laporan
Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	Memberikan informasi Kinerja Realisasi Pupuk	Berapa Realisasi Kebutuhan Pupuk Kelompok Tani	Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi _____ x 100 % Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK)
Eselai III				
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	Mengindikasikan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang mempunyai tanda tera sah	Semakin banyak alat ukur, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang mempunyai tanda tera sah maka terjaminnya kebenaran pengukuran, kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar ukuran, metode pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah tahun berjalan x 100 % Target Alat UTTP tahun berjalan

Bab II

	<p>Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTPP dan BDKT</p>	<p>Menggambarakan pelaku usaha metrologi legal yang memenuhi ketentuan</p>	<p>Melindungi konsumen agar tidak dirugikan terhadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan kesesuaian alat UTPP</p>	<p>Jumlah pelaku usaha bidang metrologi legal yang telah memenuhi ketentuan x 100 % Jumlah pelaku usaha bidang metrologi legal yang diawasi</p>
Eselon IV				
<p>Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya terhadap ketentuan berlaku</p>	<p>Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya (UTTP) yang ditera</p>	<p>Menggambarakan Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah</p>	<p>semakin banyak alat UTPP yang ditera maka terjaminnya keakuratan alat tersebut</p>	
<p>Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina</p>	<p>Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina</p>	<p>Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas kesesuaian barang dalam keadaan terbungkus dan keakuratan alat UTPP</p>	<p>semakin banyak barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan alat UTPP yang sesuai ketentuan maka mencegah kerugian konsumen</p>	

Eselon III

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perdagangan yaitu selisih antar tahun sebelumnya dan tahun berikutnya	Sebagai evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan	$\text{Nilai Kenaikan SAKIP} = \frac{\text{Nilai Tahun1} - \text{Nilai Tahun0}}{\text{Nilai Tahun0}} \times 100\%$ $\text{Nilai Tahun1} = \text{Nilai SAKIP Tahun N}$ $\text{Nilai Tahun0} = \text{Nilai SAKIP Tahun N-1}$
Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran merupakan selisih antara realisasi keuangan dengan PAGU anggaran dalam satuan persen	Realisasi Keuangan merupakan tolak ukur dari pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Keuangan}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$
Pelayanan Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Yang Tercatat	Mengindikasikan Penambahan Aset Pada Dinas Perdagangan	Pengadaan aset ditunjukkan untuk penambahan ekuitas guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana hingga diketahui jumlah aset yang menjadi milik Dinas Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Aset}}{\text{Jumlah target Pengadaan Aset}} \times 100\%$
	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	Mengindikasikan ASN yang memproses administrasi kepegawaianya	Agar diketahui berapa jumlah ASN di lingkungan Dinas Perdagangan yang pada tahun berjalan memproses pada tahun berjalan memproses administrasi kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah ASN yang memproses administrasi}}{\text{Total Jumlah ASN yang memproses administrasi}} \times 100\%$

Eselon IV

Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen kinerja yang dihasilkan pada tahun berjalan	Dokumen merupakan bukti nyata dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Dokumen adalah sebuah bentuk data-data tertulis. Dokumen juga adalah sumber resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi/pemerintah/ lembaga lainnya untuk menjadi sebuah laporan	
Menyusun Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan pada tahun berjalan	Dinas Perdagangan merupakan entitas dalam hal Laporan Keuangan, di dalam Laporan Keuangan menggambarkan keadaan awal dan akhir keuangan pada tahun berjalan, tidak hanya data keuangan saja namun mencakup aset yang dimiliki entitas.	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah Aset yang tercatat	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	Dokumen sarana dan prasarana Dinas Perdagangan merupakan bukti administrasi yang tercatat sehingga bisa diketahui pengklasifikasian sarana dan prasarana tersebut	

Bab II

Menyusun data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun berjalan	Dokumentasi pelayanan surat menyurat dibuat agar diketahui seberapa banyak surat menyurat pada tahun berjalan	
	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib pada tahun berjalan	Pelayanan diberikan agar ASN dalam pengurusan administrasi seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, permohonan cuti dan lain-lain dapat diakomodir dengan tertib	

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, berikut ikhtisar perjanjian kinerja berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja maka dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perdagangan. Adapun Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 yaitu :

Tabel 2.3
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2021

Esselon II			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6%
Esselon III			
1	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,00%
Esselon IV			
1	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	15%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	60%

4	Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali
		Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	100%
		Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	100%
Esselon III			
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	78
2	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	81,00%
3	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,50%
Esselon IV			
1	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	3 Buah
2	Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	5471 Orang/hari
		Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	1416 Orang/bulan
3	Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	1000 Data
4	Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%
5	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	98%
Esselon III			
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	50%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%

Esselon IV			
1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	100 Unit
2	Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	300
Esselon III			
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	BB
2	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100%
3	Pelayanan Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Yang Tercatat	100%,
		Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100%
Esselon IV			
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	10
2	Menyusun Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4
3	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah Aset yang tercatat	19
4	Menyusun data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	900
		Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	28

BAB



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2021 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang* merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yakni :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Pengukuran Capaian Kinerja adalah untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Adapun Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 yaitu :

Tabel 3.1. CapaianTarget dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6%	-0,23%	-3,88%

Dari tabel diatas bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan sebesar -0.23% dengan tingkat capaian -3.88% dari target tahun 2021 sebesar 6% ,adapun cara pengukuran indikator Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2021 masih mengacu pada data terakhir 2021 ([PDRB Atas Dasar Harga Konstan \(Juta Rupiah\)](#) yang di akses pada tanggal 7 Januari 2022) .

PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2021 (tahun n) sebesar Rp. 579.879.380.000,- sedangkan pada tahun 2020 (tahun n-1) sebesar Rp. 581.233.920.000,- sehingga dapat diketahui Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan.

Pertumbuhan volume Perdagangan diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan.

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

G = Laju pertumbuhan volume perdagangan

PDRB1 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n

PDRB0 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n - 1

$$G = \frac{579.879.380.000 - 581.233.920.000}{581.233.920.000} \times 100\%$$

$$G = \frac{-1.354.539.421}{581.233.920.000} \times 100\%$$

$$G = -0,23 \%$$

Adapun program-program yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran strategis dan kinerja utama sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel 3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)
Esselon III					
1	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11%	9.12%	82,90%
Esselon IV					
1	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	15%	0	0%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	60%	50%	83,33%
4	Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali	2 Kali	66,67%
		Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	24 Jenis	30 Jenis	125%
		Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100%

- **Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Dari tabel diatas bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar Rp. 579.879.380.000,- pada tahun 2021 dan total PDRB kabupaten Tapin 2021 sebesar Rp 6.358.877.790.000,- yang mengacu pada data terakhir 2020 ([PDRB Atas Dasar Harga Konstan \(Juta Rupiah\)](#) yang di akses pada tanggal 7 Januari 2022) .

Kontribusi Sektor Perdagangan diukur dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Sektor Perdagangan} &= \frac{\text{PDRB sektor perdagangan}}{\text{Total PDRB Kabupaten}} \times 100\% \\ \text{Kontribusi Sektor Perdagangan} &= \frac{579.879.380.000}{6.358.877.790.000} \times 100\% \\ \text{Kontribusi Sektor Perdagangan} &= 9.12\% \end{aligned}$$

- **Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin**

Persentase Rekomendasi Izin yang diterbitkan pada tahun 2021 rekomendasi izin dari pemohon yang masuk dan diterbitkan sebanyak 242 dari target yang ditentukan pada tahun 2021 sebanyak 100% dari seluruh permohonan surat baik itu rekomendasi izin usaha maupun izin reklame dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian} &= \frac{242}{242} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100\% \end{aligned}$$

- **Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif**

Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif pada tahun 2021 adalah 0%. Hal ini dikarenakan beberapa kendala dalam pencapaian target penerbitan resi gudang adalah :

- Lokasi Gudang SRG yang jauh dari wilayah pertanian.
- Minimnya kesadaran pemahaman asyarakat khususnya petani tentang Sistem Resi Gudang
- Budaya masyarakat yang terbiasa langsung menjual hasil pertaniannya setelah panen

- Masih maraknya tengkulak yang pro aktif turun ke wilayah pertanian yang menjanjikan dana tunai dengan membeli hasil panen tanpa proses yang berbelit-belit.
- Adanya fasilitas kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang melayani kebutuhan kredit dengan proses yang mudah dan cepat.
- Adanya pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan usaha yang sama layaknya Sistem Resi Gudang.

Rencana Aksi (Dinas Pertanian)

- Mengoptimalkan peran PPL setiap kecamatan untuk mempromosikan SRG dalam rangka meningkatkan minat petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani untuk menyimpan hasil panen di Gudang SRG;
- Merangkul pengusaha penggilingan padi melalui Kelompok Pengusaha Penggilingan yang dibina oleh Dinas Pertanian untuk dapat memanfaatkan fasilitas penyimpanan di SRG.

Rencana Aksi (Dinas Ketahanan Pangan)

- Sepakat untuk memanfaatkan jasa penggilingan dan pengeringan gabah yang ada di Gudang SRG untuk stok gabah yang ada di Gudang milik Dinas Ketahanan Pangan dimasa yang akan datang

Rencana Aksi (Dinas Perdagangan)

- Terus mengupayakan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Tapin untuk pengelolaan SRG dan pemeliharaan gudang;

- Mengoptimalkan usaha sosialisasi SRG kepada petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dengan melibatkan PPL di setiap kecamatan;
- Melanjutkan subsidi biaya angkut gabah;
- Memberikan insentif kepada PPL yang berhasil merekomendasikan petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani menyimpan hasil panennya di gudang SRG

- **Cakupan Pembinaan pelaku usaha**

Kondisi pandemi covid-19 tidak memungkinkan dilaksanakannya pembinaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga anggaran untuk pelaksanaan pembinaan pelaku usaha dihapus dalam rangka refocusing. Sehingga Cakupan pembinaan pelaku usaha pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 60 orang dengan capaian 50 orang dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian} &= \frac{50}{60} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 83,33\% \end{aligned}$$

Adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 berakibat dihapusnya anggaran pembinaan pelaku usaha. Penghapusan anggaran tersebut bukan berarti tidak ada pembinaan terhadap pelaku usaha. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan ikut berkontribusi pada kegiatan SKPD lain yaitu :

- Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga tahun anggaran 2021 di Desa Mandurian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga

Kerja Provinsi Kalsel bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin yang diundang sebagai narasumber.

- Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Desa Bitahan Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Kalsel.
- Optimalisasi strategi pemasaran anyaman purun dalam upaya meningkatkan kemandirian sosial masyarakat Desa Pebaungan Hulu yang merupakan program Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh Tim Pejuang Muda yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

• **Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti**

Pada tahun 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam DPA Dinas Perdagangan Pameran yang akan diikuti, ditargetkan sebanyak 3 event, karena kondisi pandemi maka panitia dari 3 event pameran yang rencananya akan diikuti membatalkan kegiatan mereka. Meskipun rencana pameran yang akan diikuti tersebut dibatalkan maka rencana pameran dialihkan untuk pameran terbatas yang dilaksanakan oleh Kodim 1010 Tapin dan berkontribusi pada pameran yang diikuti oleh Polres Tapin di Polda Kalsel di Banjarbaru. Dengan tingkat capaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian} &= \frac{2}{3} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 66,67\% \end{aligned}$$

- **Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan**

Jenis produk yang dipamerkan pada tahun 2021 sebanyak 30 jenis dengan target yang telah ditentukan 24 jenis

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{30}{24} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 125 \%\end{aligned}$$

Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya bahwa karena kondisi pandemi beberapa event pameran yang sedianya akan diikuti dibatalkan maka kegiatan pameran dialihkan pada pameran terbatas yang dilaksanakan oleh Kodim 1010 Tapin dan berkontribusi pada pameran yang diikuti oleh Polres Tapin di Polda Kalsel di Banjarbaru serta berhasil mempromosikan 30 Jenis produk lokal dari 24 jenis yang ditargetkan.

- **Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan**

Sebanyak 30 jenis produk lokal yang diikutikan dalam pameran terbatas oleh Kodim 1010 Tapin dan Polda Kalsel merupakan hasil produksi dari 30 pelaku usaha yang potensial untuk dipromosikan, sehingga target 30 pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan pada tahun 2021 sebanyak 30 pelaku usaha dapat terrealisasi. Dengan tingkat capaian sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{30}{30} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100 \%\end{aligned}$$

Tabel 3.1.2 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Pengembangan Saran Distribusi Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021
Esselon III					
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	78	76,66	98,28
2	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	81%	77,78%	96,02%
3	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,50%	0,87%	142,33 %
Esselon IV					
1	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	3 Buah	2 Buah	66,67%
2	Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	5471 Orang/hari	5459 Orang/hari	99,79%
		Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	1416 Orang/bulan	1416 Orang/bulan	100%
3	Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	1000 Data	920 Data	92%
4	Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	98%	78,94%	80,55

- **Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar**

Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam pelayanan sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan
2	Kondisi bangunan pasar
3	Kejelasan Petugas Pelayanan
4	Kemampuan Petugas Pelayanan
5	Kebersihan lingkungan pasar
6	Kesopanan dan Keramahan Pelayan
7	Kewajaran Biaya Pelayanan
8	Kepastian Biaya Pelayanan
9	Kenyamanan Lingkungan
10	Keamanan Pelayanan

Jawaban atas setiap unsur pertanyaan diatas dikategorikan ke dalam empat tingkatan kualitas pelayanan yaitu:

No	Jawaban	Bobot
1	Tidak baik	1
2	Kurang baik	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) x 25

Adapun kategorisasi nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,50 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan sample yang dijadikan responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun 2021 di Pasar Kabupaten Tapin ini berjumlah 110 orang, dengan hasil yang diperoleh dari survey menunjukkan kinerja unit pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76,66 berada dalam interval 76,61 – 88,30 dengan mutu kepuasan B yang dikategorikan Baik, perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap pelayanan. Data olahan dari hasil survei dapat dilihat pada lampiran.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai terendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus tetap di pertahankan.

Survey kepuasan Masyarakat yang belum bisa mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat senilai 78. Adapun unsur yang perlu terus memperoleh perhatian untuk ditingkatkan, yaitu Kondisi Bangunan Pasar, Kebersihan Lingkungan Pasar dan Kewajaran Biaya Pelayanan.

- **Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak**

Indikator ini dihitung menurut jumlah aset gedung dan bangunan yang dikuasai dan terdapat pada SIMDA BMD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dengan capaian target sebesar 81% pada tahun 2021, adapun realisasi pada indikator ini dihitung sebagai berikut :

NO	NAMA PASAR	Lokasi	JUMLAH BANGUNAN	STATUS BANGUNAN	
				LAYAK	TIDAK LAYAK
1	Pasar Binuang Baru	Kecamatan Binuang	2	2	0
2	Pasar Hatungun	Kecamatan Hatungun	1	0	1
3	Pasar Batung	Kecamatan Piani Desa Batung	4	4	0
4	Pasar Margasari	Kecamatan Candi Laras Selatan	4	2	2
5	Pasar Raya Rantau	Kecamatan Tapin Utara Rantau	4	4	0
6	Pasar Tambarangan	Kecamatan Tapin Selatan	1	1	0
7	Pasar Bakarangan	Kecamatan Bakarangan	1	1	0
8	Pasar Miawa	Kecamatan Piani Desa Miawa	1	1	0
9	Pasar Keraton Rantau	Kecamatan Tapin Utara Jl. Keraton	13	9	4
10	Pasar Salam Babaris	Kecamatan Salam Babaris	1	1	0
11	Pasar Tatakan	Kecamatan Tapin Selatan	2	1	1
12	Pasar Bungur	Kecamatan Bungur	1	1	0
13	Pasar Muara Muning	Kecamatan Candi Laras Selatan	1	1	0
Total			36	28	8
Persentase				77,78%	22,22%

Tingkat capaian Indikator Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak tahun 2021 berdasarkan rumus indikator sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{77,78\%}{81\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 96,02\%$$

- **Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok**

Koefisien variasi tertinggi ditahun 2021 yaitu pada komoditas cabe rawit sebesar 0,87% dari target sebesar 1,5% dengan tingkat capaian sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{1,5 - (0,87-1,5)}{1,5} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 142,33 \%$$

NO	NAMA BAHAN POKOK	RATA-RATA	STANDAR DEVIASI	KOEFISIEN VARIASI
1	Beras Medium	11.000,00	0,00	0,00
2	Kacang kedelai	13.500,00	1495,83	0,11
3	Cabe Merah	49.708,33	33627,45	0,68
4	Cabe Rawit	62.029,17	53661,15	0,87
5	Bawang Merah	34.237,50	28056,70	0,82
6	Daging Ayam	34.575,00	5763,71	0,17
7	Daging Sapi	130.000,00	0,00	0,00
8	Telur	24.795,83	2344,00	0,09
9	Ikan Kembung	29.583,33	14722,84	0,50
10	Minyak Goreng	15.218,75	2633,64	0,17
11	Tepung Terigu	11.000,00	0,00	0,00
12	Gula Pasir	12.041,67	239,18	0,02
Koefisien variasi tertinggi ditahun 2021 yaitu pada komoditas cabe rawit sebesar				0,87

- **Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki**

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk target tahun 2021 sebesar 3 buah sarana dan prasarana yang dibangun/ diperbaiki namun sampai dengan akhir tahun hanya dapat terlaksana 2 buah yaitu :

1. Rehab WC Pasar Keraton

Kondisi WC sebelum direhab kurang layak karena usia bangunan yang sudah lebih dari 5 tahun sehingga mengakibatkan kerusakan pada drainase,

lantai serta dinding yang rusak dan aroma tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli;

2. Rehab Tempat Pelayanan Pembayaran Retribusi Pasar

Untuk mempermudah para pedagang dalam membayar retribusi tokonya maka diperlukan Rehab Loker di UPT Pasar Keraton, pada kondisi loket sebelumnya kurang layak sehingga pada tahun 2021 dilakukan rehab agar memberikan rasa nyaman terhadap pedagang maupun petugas loket pasar

Adapun yang tidak dapat terlaksana yaitu pembuatan lapak pedagang sayur di Pasar Keraton karena jumlah pedagang kaki lima (PKL) lebih banyak dari pada jumlah lapak yang akan dibangun.

Tingkat capaian pada tahun 2021 adalah

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{2}{3} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 66,67 \%$$

• Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas

Jumlah petugas keamanan yang telah diturunkan selama tahun 2021 adalah 5459 kali dari Orang/hari dengan target 5471 kali dari Orang/hari. Sehingga tingkat capaian pada tahun 2021 adalah

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{5459}{5471} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 99,79 \%$$

• Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas

Jumlah petugas keamanan yang telah diturunkan selama tahun 2021 adalah 1416 Orang/bulan dengan target 1416 dari Orang/hari. Sehingga tingkat capaian pada tahun 2021 adalah

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{1416}{1416} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

No	Petugas Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan Yang Bertugas				
		Target	Realisasi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Mandor Pasar Keraton	12	3	6	9	12
2	Mandor Pasar Binuang	12	3	6	9	12
3	Mandor Pasar Raya	12	3	6	9	12
4	Drainase Pasar Binuang	96	8	48	64	96
5	Drainase Pasar Raya	120	10	60	80	120
6	Drainase Pasar Keraton	240	45	165	210	240
7	Kebersihan Pasar Batung	12	3	6	9	12
8	Kebersihan Pasar binuang	108	27	54	81	108
9	Kebersihan Pasar keraton	456	114	228	342	456
10	Kebersihan Pasar margasari	24	6	12	18	24
11	Kebersihan Pasar miawa	12	3	6	9	12
12	Kebersihan Pasar muara muning	12	3	6	9	12
13	Kebersihan Pasar Raya	288	72	144	216	288
14	Kebersihan Pasar tambarangan	12	3	6	9	12
	Total	1.416	303	753	1074	1416

- Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat

Terpenuhinya Permohonan Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/ Warung selama tahun 2021 dengan jumlah 920 surat dari target yang ditentukan sebesar 1000 surat yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{920}{1000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 92 \%$$

NO	NAMA PASAR	JUMLAH TOKO	KEADAAN OPERASIONAL TOKO	
			Aktif	Tidak Aktif
1	Pasar Keraton	434	360	74
2	Pasar Raya Rantau	454	399	55
3	Pasar Binuang	196	145	51
4	Pasar Tambarangan	30	16	14
TOTAL		1114	920	194

- **Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Persentase Ketersediaan informasi Barang Pokok dan Penting merupakan tersedianya data harga sembako dan barang penting lainnya di Kab. Tapin selama 1 (satu) tahun, dimana pendataan yang ditargetkan sebanyak 48 kali, dalam satu bulannya dilaksanakan sebanyak 4 kali.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{48}{48} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

- **Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran**

Berdasarkan rekapitulasi pupuk bersubsidi bulan Januari sampai dengan Desember di Kabupaten Tapin tahun 2021 Alokasi Pupuk bersubsidi sebesar 9.644 dengan realisasi 7.612,65 sebesar 78,94%, adapun jenis pupuk yang disalurkan yaitu UREA, SP-36, ZA, NPK, Organik Granul, Organik Cair. Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran dari target sebesar 98% dengan tingkat capaian dan alokasi perkecamatan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{78,94}{98} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 80,55 \%$$

No	Kecamatan	Alokasi Pupuk (Ton)	Serapan Pupuk (Ton)	Sisa (Ton)	Persentase
1	Bakarangan	501,00	340,20	160,80	67,90%
2	Binuang	875,75	798,80	76,95	91,21%
3	Bungur	454,25	376,50	77,75	82,88%
4	Candi Laras Selatan	688,25	650,00	38,25	94,44%
5	Candi Laras Utara	1.345,50	1.117,50	228,00	83,05%
6	Hatungun	402,00	323,50	78,50	80,47%
7	Lokpaikat	376,75	287,40	89,35	76,28%
8	Piani	673,50	403,50	270,00	59,91%
9	Salam Babaris	918,75	852,55	66,20	92,79%
10	Tapin Selatan	1.315,00	882,50	432,50	67,11%
11	Tapin Tengah	1.247,75	959,45	288,30	76,89%
12	Tapin Utara	845,50	620,75	224,75	73,42%
Jumlah		9.644,00	7.612,65	2.031,35	78,94%

Tabel 3.1.3 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021
Esselon III					
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	50%	28%	56%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%
Esselon IV					
1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	100 Unit	28 Unit	28%
2	Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	100%

- **Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan**

Pelaksanaan Tera/tera ulang dikabupaten belum mandiri sehingga harus difasilitasi dan Adanya Peningkatan Covid 19. sehingga perlunya Mengusulkan penyesuaian SOTK dan melakukan perubahan anggaran kegiatan yang dapat dilakukan pada saat pandemi dengan mengkoordinasikan dengan kasi kemetrolgion mengenai penyusunan rencana kegiatan yg akan dilakukan terkait program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Selama tahun 2021 Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang sebanyak 28% dari target 50% sehingga tingkat capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{28\%}{50\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 56 \%$$

- **Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT**

Pelaksanaan pengawasan terhadap UTTP dan BDKT masih terkendala Adanya Peningkatan Covid 19. Sehingga mengkoordinasikan dengan dan kasi pengawasan mengenai penyusunan rencana kegiatan yg akan dilakukan terkait program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Selama tahun 2021 telah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang metrologi sehingga tingkat capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

- **Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera**

Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP mengalami penurunan, Karena merupakan dampak Pandemi Covid-19, dimana berdasarkan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat PPKM level 4 yang berlaku di beberapa wilayah Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Tapin maka Pelayanan Tera/Tera Ulang terjadi penundaan dari jadwal yang telah dibuat oleh BSML Region III untuk Kabupaten Tapin dan Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit Metrologi Legal di Kabupaten Tapin

sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang. Karena Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak dapat dilaksanakan otomatis sertifikat Tera/Tera Ulang tidak diterbitkan, maka sebagai gantinya diberikan surat keterangan penundaan Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang bagi pemohon. Selama tahun 2021 Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang sebanyak 28 Unit dari target 100 Unit sehingga tingkat capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{28}{100} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 28 \%$$

- **Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina**

Rencananya Penyuluhan kemetrologian dilakukan secara langsung yaitu penyuluhan kemetrologian melalui tatap muka dengan jumlah peserta 300 orang dengan dua kali pelaksanaan kegiatan karena kondisi penyebaran covid yang semakin meningkat maka penyuluhan melalui tatap muka tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Pada Anggaran Perubahan kegiatan diubah menjadi Penyuluhan secara tidak langsung yaitu penyuluhan kemetrologian melalui media cetak sehingga tingkat capaian dapat tercapai dengan capaian sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{300}{300} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Analisis realisasi dan capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	9%	7,84	10%	6,38	6%	-0,23%
	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9%	8.82%	10%	9.0%	11%	9.12%
	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	-	-	-	-	15%	0
	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	-	-	-	-	60%	50%
	Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali	3 Kali	3 Kali	1 Kali	3 Kali	2 Kali
		Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	22 Jenis	22 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	30 Jenis
		Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	-	-	-	-	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha
	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	75 IKM	69.82 IKM	76 IKM	72.09 IKM	78 IKM	76.66 IKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	-	-	-	-	81%	77,78%
	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	1,5%	0,87%
	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki layak	-	-	-	-	3 Buah	2 Buah
	Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	-	-	-	-	5471 orang/hari	5459 orang/hari
		Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	-	-	-	-	1416 Orang/bulan	1416 Orang/bulan
	Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	1000	660	1000	735	1000	920
	Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	-	-	98%	97,78%	98%	78,94%
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	100%	85,08%	100%	48%	50%	28%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	1320 buah	1123 buah	150 Buah	72 unit	100 Unit	28 Unit
	Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Analisis capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan		Tingkat Capaian %
			Target 2023	Realisasi 2021	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	8%	-0,23%	-2,88%
2	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,5%	9,12%	72,96
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	79 IKM	76,66 IKM	97,04%
4	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	89%	77,78%	87,39%
5	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,40%	0,87%	138,21

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan		Tingkat Capaian %
			Target 2023	Realisasi 2021	
6	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	70%	28%	40%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%

4. Perbandingan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalsel

Pada perbandingan ini masih menunjukkan data Tahun 2021 masih menggunakan nilai sementara, karena nilai tersebut BPS belum mengeluarkan Nilai PDRB tahun 2020, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

Pada tahun 2016 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 8,78% menempati urutan ke-3 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2017 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 6,49% menempati urutan ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2018 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 7,84% menempati urutan ke-5 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2019 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 6,38% menempati urutan ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Pada tahun 2020 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin -0,23% menempati urutan ke-1 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan terendah

Berikut ini adalah tabel Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Konstan (ADHK) :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Tanah Laut	8,15%	7,85%	7,95%	7,21%	6,59%	-2,93%	-2,93%
2	Kotabaru	8,37%	7,34%	7,77%	7,45%	7,10%	-1,41%	-1,41%
3	Banjar	7,82%	7,84%	6,75%	6,91%	6,39%	-3,93%	-3,93%
4	Balangan	5,89%	7,71%	8,12%	3,70%	4,68%	-0,93%	-0,93%
5	Banjarbaru	7,07%	8,18%	8,03%	7,96%	7,75%	-3,09%	-3,09%
6	Banjarmasin	6,54%	7,00%	6,87%	6,83%	6,89%	-5,15%	-5,15%
7	Barito Kuala	7,82%	7,92%	7,77%	7,68%	7,22%	-3,35%	-3,35%
8	Hulu Sungai Selatan	4,76%	4,60%	5,28%	4,84%	4,96%	-1,91%	-1,91%
9	Hulu Sungai Tengah	9,37%	7,91%	6,89%	7,74%	8,60%	-3,36%	-3,36%
10	Hulu Sungai Utara	7,44%	7,97%	8,24%	8,13%	7,51%	-4,65%	-4,65%
11	Tabalong	8,67%	9,03%	11,33%	9,47%	9,48%	-2,30%	-2,30%
12	Tanah Bumbu	8,21%	10,22%	9,20%	8,41%	8,19%	-4,53%	-4,53%
13	Tapin	7,88%	8,78%	6,49%	7,84%	6,38%	-0,23%	-0,23%

* Catatan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2021 merupakan data sementara yang merupakan update terbaru dari BPS masing-masing Kabupaten/Kota

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung atau penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan perencanaan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang mendukung keberhasilan atau faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Atau Penghambat

- i. Pada tahun 2021 terdapat penurunan beberapa indikator karena merupakan masih dalam masa pandemi Covid-19, dimana Kabupaten Tapin menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sehingga mengakibatkan jam operasional pasar tradisional, warung/cafe, tempat hiburan maupun toko swalayan dibatasi, selain itu juga berkurangnya aktifitas masyarakat diluar rumah sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah transaksi jual beli selain kebutuhan barang pokok dan barang penting.
- ii. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP mengalami penurunan, karena merupakan Dampak Pandemi Covid-19, dimana berdasarkan edaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Surat Nomor 637/PKTN/4.3/SD/04/2020 tanggal 1 April 2020 bahwa dimasa pandemic covid 19 ditunda operasional pelayanan tera, tera ulang alat UTTP diwilayah kabupaten/ kota atau disesuaikan dengan status keadaan darurat yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat. Selain itu juga pelayanan tera, tera ulang belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak untuk melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin baru ada 1 orang sedangkan area pelayanan begitu luas mencakup 12 kecamatan.
- iii. Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit

Metrologi Legal di Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang

- iv. Pengawasan kemetrolgian saat ini belum maksimal dikarenakan belum memiliki fungsional pengawas dan PPNS Kemetrolgian yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, serta minimnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang aturan kemetrolgian
- v. Penyuluhan kemetrolgian dilakukan secara langsung yaitu penyuluhan kemetrolgian melalui tatap muka dengan jumlah peserta 100 orang dengan dua kali pelaksanaan kegiatan karena kondisi penyebaran covid yang semakin meningkat maka penyuluhan melalui tatap muka tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
- vi. Adanya perubahan ketentuan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga pencapain target mengalami penurunan
- vii. Sosialisasi dengan cara memasang spanduk dan berkoordinasi dengan kelompok tani dimasing-masing kecamatan
- viii. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB berdasarkan proyeksi PDRB ADHK Tahun 2021 adalah 9,31% atau sebesar Rp.578.527.996.000,- dari total PDRB ADHK sebesar Rp.6.267.846.416.000,-. Berdasarkan target sebesar 11% maka tingkat capaian Kontribusi Sektor Perdagangan hanya sebesar 84,64%. Tingkat capaian tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor ekonomi juga dipengaruhi oleh dinamika sektor lainnya. Meskipun demikian sektor

perdagangan masih berada pada urutan ketiga terbesar dari 17 sektor yang berkontribusi pada pembentukan PDRB.

- ix. Minimnya data jumlah dan klasifikasi pelaku usaha yang akurat sebagai akibat pendataan pelaku usaha yang tidak maksimal karena kendala pandemi covid-19 mengakibatkan sulitnya penetapan proyeksi target yang harus dicapai.
- x. Pada Tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (pedagang) meningkat, hal ini disebabkan diantaranya peningkatan pengelolaan keamanan, dan ketertiban di lingkungan pasar, serta lokasi pasar yang baru ditempati oleh pedagang di Pasar Binuang Baru yang dimana pedagang merasa nyaman di lokasi pasar tersebut.
- xi. Kurangnya kesadaran dari PKL dalam berjualan sesuai dengan penempatannya sehingga kurang tertata dengan rapi di lingkungan pasar Keraton khususnya dilokasi berjualan pasar pagi.
- xii. Belum adanya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Sembako Perdagangan di Kabupaten Tapin .
- xiii. Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Tapin tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tapin.

b. Alternative Solusi

- i. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Untuk Melakukan Vaksinasi bagi para pedagang dan pembeli di beberapa pasar kabupaten seperti pada Pasar Raya Rantau, Pasar Keraton, Pasar Binuang, Pasar Miawa, Pasar Batung untuk mendukung capaian vasinasi minimal 70% di Kabupaten Tapin.
- ii. Pada tahun 2021 Dinas Perdagangan berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta bekerjasama dengan BMSL Regional III untuk melakukan tera/tera ulang, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun - tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera baru.
- iii. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrologian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang perlindungan konsumen untuk bersama sama melakukan pengawasan kemetrologian untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur, Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTPP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tapin sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku.
- iv. Mengkoordinasikan dengan kasi kemetrologian dan kasi pengawasan mengenai penyusunan rencana kegiatan yg akan dilakukan terkait program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan

- v. Untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Dinas Perdagangan akan lebih memaksimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan karena kendala pandemi covid-19.
- vi. Memperluas cakupan wilayah dalam pelaksanaan pendataan pelaku usaha.
- vii. Setiap tahunnya melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun online dan terus berkoordinasi dengan kelompok tani.
- viii. Upaya yang dilakukan untuk melakukan penataan pedagang kaki lima adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dagang bagi kaki lima dan melakukan pendataan dan sosialisasi tentang ketertiban untuk tidak berjualan dilokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan. Serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima yang berjualan diarea terlarang.
- ix. Melaksanakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di lokasi terminal pasar keraton rantau ke lokasi pasar keraton yang telah ditentukan agar pedagang dan pembeli lebih nyaman dan tertib dalam melakukan transaksi .
- x. Kegiatan sistem dan jaringan informasi perdagangan merupakan upaya untuk pengendalian ketersediaan stok barang dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis, sehingga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta kenaikan harga dapat dimonitoring serta dikendalikan pada tahap yang wajar tidak berlebihan, serta mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab

dengan melakukan peminbunan stok barang untuk mendapatkan harga jual yang lebih mahal.

- xi. Untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Tapin sehingga menjadi pasar yang nyaman, bersih dan sehat dengan tidak hanya bergantung pada APBD maka kami mengajukan proposal ke kementerian perdagangan RI baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Tugas Pembantuan (TP) yang sumber dari APBN.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Dinas Perdagangan Kabupaten sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja, akan tetapi terkendala kekurangan staf ASN pada masing-masing bidang. Hal ini dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan dirasa belum cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan belum terdapat aula rapat dan perangkat komputer yang masih kurang lengkap serta ruang arsip untuk menyimpan berkas kurang memadai karena kondisi kantor tidak begitu luas, akan tetapi tersedianya anggaran

untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas Perdagangan Tahun 2021 melaksanakan 7 program dengan 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.658.880.926,00 realisasi Rp. 7.621.108.220,00 (88,01%) dengan sumber dananya dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja Perangkat Daerah. Kinerja yang dihasilkan merupakan tolak ukur dari keberhasilan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Tabel 3.5 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian 2021	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Kepala Dinas Perdagangan					
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	-3,88%	88,01%	Tidak efisien
	Pada indikator ini tidak efisien karena lebih besar realisasi anggaran dari pada tingkat capaian indikator kinerja hal ini dikarenakan atas dampak pandemi covid-19 sehingga perekonomian seluruh dunia menurun				
Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan					
2	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	82,90%	51,89%	Sangat efisien
	Tingkat capaian indikator kinerja lebih besar dari realisasi anggaran sehingga dapat dikategorikan sangat efisien				
Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan					
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	98,28%	84,31%	efisien
	Tingkat capaian indikator kinerja lebih besar dari realisasi anggaran sehingga dapat dikategorikan efisien				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian 2021	Realisasi Anggaran	Efisiensi
4	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	96,02%	84,31%	Efisien
Tingkat capaian indikator kinerja lebih besar dari realisasi anggaran sehingga dapat dikategorikan efisien					
5	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	142,33%	81,94%	Sangat efisien
Tingkat capaian indikator kinerja lebih besar dari realisasi anggaran sehingga dapat dikategorikan sangat efisien					
Bidang Kemetrolologi dan Pengawasan Perdagangan					
6	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	56%	93,94%	Kurang efisien
Tingkat capaian indikator kinerja lebih kecil dari realisasi anggaran sehingga dapat dikategorikan kurang efisien hal ini dikarenakan atas dampak pandemi covid-19 untuk pelayana tera/tera ulang dibatasi oleh Badan Standarisasi Metrologi Legal akan tetapi dalam segi anggaran merupakan kegiatan pembelian barang serta jasa kalibrasi alat standar kemetrolagian					
7		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	93,94%	Efisien
Tingkat capaian indikator kinerja lebih besar dari realisasi anggaran sehingga dapat dikategorikan efisien					

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, didukung oleh:

NO.	Nama Program	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	82,90%
2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
3	Program Pengembangan Ekspor		

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB berdasarkan proyeksi PDRB ADHK Tahun 2021 adalah 9,31% atau sebesar Rp. 579.879.380.000,- dari total PDRB ADHK sebesar Rp 6.358.877.790.000,-. Berdasarkan target sebesar 11% maka tingkat capaian Kontribusi Sektor Perdagangan hanya sebesar 82,90%. Tingkat capaian tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor ekonomi juga dipengaruhi oleh dinamika sektor lainnya. Meskipun demikian sektor perdagangan masih berada pada urutan ketiga terbesar dari 17 sektor

yang berkontribusi pada pembentukan PDRB, untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Dinas Perdagangan akan lebih memaksimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pada tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan karena kendala pandemi covid-19.

4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	98,28%
		Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	96,02%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) yang dinilai adalah kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan pasar. Indikator ini belum mencapai target yang telah ditentukan akan tetapi sudah termasuk kategori baik dimana pada tahun 2021 dilaksanakan penertiban PKL di pasar keraton serta peningkatan kebersihan.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk target tahun 2021 sebesar 3 buah sarana dan prasarana yang dibangun/ diperbaiki namun sampai dengan akhir tahun hanya dapat terlaksana 2 buah yaitu :

1. Rehab WC Pasar Keraton

Kondisi WC sebelum direhab kurang layak karena usia bangunan yang sudah lebih dari 5 tahun sehingga mengakibatkan kerusakan pada drainase, lantai serta dinding yang rusak dan aroma tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli;

2. Rehab Tempat Pelayanan Pembayaran Retribusi Pasar

Untuk mempermudah para pedagang dalam membayar retribusi tokonya maka diperlukan Rehab Loker di UPT Pasar Keraton, pada kondisi loket sebelumnya kurang layak sehingga pada tahun 2021 dilakukan rehab agar memberikan rasa nyaman terhadap pedagang maupun petugas loket pasar

5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	142,33%
---	---	--	---------

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok yang diambil adalah harga varietas cabe rawit dimana merupakan Koefisien tertinggi dibanding kebutuhan pokok lainnya, dimana pada awal tahun 2021 harga cabe rawit melonjak sangat tinggi mencapai lebih dari harga normalnya dikarenakan curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan kegagalan panen akibat banjir serta terserang bakteri, pada akhir tahun harga sudah mulai stabil dengan harga normal.

6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	56%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator pada indikator ini kategori rendah karena disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit

Metrologi Legal di Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang

- b. Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP mengalami penurunan, Karena merupakan dampak Pandemi Covid-19, dimana berdasarkan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat PPKM level 4 yang berlaku di beberapa wilayah Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Tapin maka Pelayanan Tera/Tera Ulang terjadi penundaan dari jadwal yang telah dibuat oleh BSML Region III untuk Kabupaten Tapin

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melaksanakan 7 program dengan 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.658.880.926,00 realisasi Rp. 7.621.108.220,00 (88,01%) dengan sumber dananya dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2021. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target karena terkendala waktu pelaksanaan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, adanya pandemi Covid-19 selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Dinas Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya mempunyai 7 (tujuh) program yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.147.984.626,00	3.144.636.982,00	3.347.644,00	99,89
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.900.000,00	2.264.300,00	1.635.700,00	58,06
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.100.000,00	3.474.600,00	2.625.400,00	56,96

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.426.300,00	15.407.650,00	18.650,00	99,88
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.447.200,00	73.535.800,00	911.400,00	98,78
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.259.800,00	78.406.900,00	13.852.900,00	84,98
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.040.000,00	21.036.400,00	3.600,00	99,98
5	Penyediaan Bahan/Material	3.097.400,00	0,00	3.097.400,00	0,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.932.000,00	311.642.943,00	87.289.057,00	78,12

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.650.500,00	122.565.600,00	2.084.900,00	98,33
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	30.514.200,00	30.411.000,00	103.200,00	99,66

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.281.600,00	113.492.104,00	16.789.496,00	87,11
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.580.000,00	135.600.000,00	54.980.000,00	71,15

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**

Daerah

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.781.100,00	43.248.691,00	39.532.409,00	52,24
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.060.000,00	9.770.000,00	9.290.000,00	51,26
3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.344.000,00	17.735.000,00	8.609.000,00	67,32

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin**

Usaha Toko Swalayan

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	37.924.800,00	31.900.800,00	6.024.000,00	84,12

- **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol B dan C	10.775.000,00	6.675.000,00	4.100.000,00	61,95

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	861.127.500,00	400.076.000,00	461.051.500,00	46,46
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.627.199.800,00	2.537.409.800,00	89.790.000,00	96,58

- **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pembinaan dan Pengendalian Sarana dan Pengelola Distribusi Perdagangan	111.143.800,00	97.312.150,00	13.831.650,00	87,56

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- **Menjamin Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	19.015.000,00	9.222.000,00	9.793.000,00	48,50

- **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	63.800.000,00	58.670.000,00	5.130.000,00	91,96

5. Program Pengembangan Ekspor

- **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	14.999.900,00	6.670.000,00	8.329.900,00	44,47
2	Pameran Dagang Nasional	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00	0
3	Pameran Dagang Lokal	0,00	0,00	0,00	0

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri**

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.154.200,00	47.449.000,00	2.705.200,00	94,61
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Logal	16.292.200,00	14.972.400,00	1.319.800,00	91,90

7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)	%
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	404.400.000,00	273.473.100,00	130.926.900,00	67,62

BAB

IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) disusun dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin menyusun LKIP tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Perdagangan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan 7 program yang tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2021

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2021.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strengths*) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin berdasarkan capaian indikator kinerja utama dengan realisasi -0,23% hal ini dikarenakan faktor eksternal yaitu dampak pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, akan tetapi dalam capaian rata-rata setiap program sebesar 95,92% sehingga

dapat dikategorikan **Baik**, walaupun realisasi keuangan tidak mencapai 100% yakni hanya mencapai 88,01%.

Pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun penyelenggaraan tugas secara struktural sebagian besar dapat berjalan dengan lancar, disamping evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat disinerjikan dengan langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama Intansi Terkait dan Lembaga/Perusahaan Swasta yang profesional dan sesuai dengan bidangnya.

Dari kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021 diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan ditahun 2022 sehingga dihasilkan kegiatan yang mengacu pada sasaran dan program yang bersifat transparan dan akuntabel.

Atas pencapaian terhadap beberapa program sasaran Dinas Perdagangan tersebut tidak lepas dari dukungan semua pihak, atas dukungannya diucapkan terimakasih. Semoga LKIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Perdagangan pada tahun-tahun berikutnya.

Rantau, 25 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin



H.HERMANSYAH,S.HUT,MMA
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700923 199703 1 005

**NILAI BOBOT JAWABAN RESPONDEN, NILAI PER UNSUR, NILAI RATA-RATA, NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
DAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG) PADA TAHUN 2021**

NO	UNSUR PELAYANAN	ALTERNATIF JAWABAN DAN BOBOT NILAI										JUMLAH NILAI		
		A	NU	B	NU	C	NU	D	NU	NILAI UNSUR	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR		
1	Prosedur Pelayanan	0	0	2	4	101	303	7	28	335	3,05	0,305		
2	Kondisi bangunan pasar	0	0	10	20	95	285	5	20	325	2,95	0,295		
3	Kejelasan Perugas Pelayanan	0	0	2	4	98	294	10	40	338	3,07	0,307		
4	Kemampuan Petugas Pelayanan	0	0	2	4	103	309	5	20	333	3,03	0,303		
5	Kebersihan lingkungan pasar	0	0	6	12	102	306	2	8	326	2,96	0,296		
6	Kesopanan dan Keramahan Pelayan	0	0	1	2	98	294	11	44	340	3,09	0,309		
7	Kewajaran Biaya Pelayanan	0	0	5	10	100	300	5	20	330	3,00	0,300		
8	Kepastian Biaya Pelayanan	0	0	1	2	64	192	45	180	374	3,40	0,340		
9	Kenyamanan Lingkungan	0	0	1	2	104	312	5	20	334	3,04	0,304		
10	Kemamanan Pelayanan	0	0	3	6	96	288	11	44	338	3,07	0,307		
Jumlah NRR Terbagi/Unsur											3.066			
Indeks Kepuasan Masyarakat											76,66			
Mutu Pelayanan											B			
Kinerja Unit Pelayanan											Baik			

Rantau, 26 Oktober 2021
 Kepala Dinas Perdagangan
 Kabupaten Lingsi,

 H. HARLIANSYAH, SE, MM
 NIP. 19660203 199302 1 002

No Responden	Unsur yang dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
62	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
63	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
64	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
65	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2
66	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
69	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
71	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
72	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
76	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
77	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
79	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
80	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
90	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
92	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
93	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
100	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
101	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
102	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
103	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
104	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
105	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3
106	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
107	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
108	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
109	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
110	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3

Nilai/Unsur	335	325	338	333	326	340	330	374	334	338
NRR/Unsur	3,05	2,95	3,07	3,03	2,96	3,09	3,00	3,40	3,04	3,07
NRR Terbagi/Unsur	0,305	0,295	0,307	0,303	0,296	0,309	0,300	0,340	0,304	0,307
Jumlah NRR Terbagi/Unsur	3,066									
Indeks Kepuasan Masyarakat	76,66									
Mutu Pelayanan	B									
Kinerja Unit Pelayanan	Baik									

**PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG)
TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PER RESPONDEN**

SKPD
TAHUN

: DINAS PERDAGANGAN
: 2021

No Responden	Unsur yang dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
8	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3
12	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
14	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
15	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
21	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3
37	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2
38	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
47	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
48	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3
49	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
50	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
57	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
58	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan : Pembangunan No. 6 Telp. (0517) 31024 Rantau Kodepos 71111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
NOMOR : 510/53.1/Sekt-DISDAG/2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 19 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Tapin,



H. HARLIANSYAH, SE, MM
NIP. 19660203 199302 1 002

IKU DINAS PERDAGANGAN

Kinerja Utama / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Mengindikasikan Pertumbuhan Volume Perdagangan	Semakin tinggi pertumbuhan volume Perdagangan akan mencapai sasaran strategis perekonomian Kab. Tapin	Pertumbuhan volume Perdagangan diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan $G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$ $G =$ Laju pertumbuhan volume perdagangan PDRB1 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n PDRB0 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n - 1	Kepala Dinas	BPS Tapin		
Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Mengindikasikan peran sektor perdagangan terhadap PDRB	semakin besar peran sektor perdagangan akan memberikan kontribusi positif terhadap perdagangan PDRB	Sektor Ekonomi = $\frac{PDRB \text{ Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Kabid P3	BPS Tapin		
Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	Mengindikasikan banyaknya rekomendasai izin usaha yang diterbitkan	Semakin banyak rekomendasai izin usaha maka semakin meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki rekomendasai lain usaha x 100% Jumlah pelaku usaha	Kepala Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Usaha	Rekap Permohonan Rekomendasi Izin Usaha		
Meningkatnya Pengelblaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan Jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	Mengindikasikan persentase petani yang menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG)	Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) maka meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan dalam daerah	$G = \frac{\text{Jumlah Resi1} - \text{Jumlah Resi0}}{\text{Jumlah Resi0}} \times 100\%$ $G =$ Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif Jumlah Resi1 = Jumlah Resi pada tahun n Jumlah Resi0 = Jumlah Resi pada tahun n - 1	Kepala Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Dokumen Resi Gudang		
Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	Mengindikasikan banyaknya pelaku usaha yang dibina	Semakin banyak pelaku usaha yang dibina maka semakin meningkatnya tertib usaha	Jumlah pelaku usaha yang dibina x 100% Jumlah pelaku usaha	Kepala Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Data Pelaku Usaha		
Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	Jumlah Pameran yang diikuti untuk promosi produk lokal	pameran merupakan sarana untuk melakukan promosi		Kasi Pengembangan Perdagangan	laporan hasil pameran		
	Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	Jumlah Jenis Produk lokal yang dipromosikan	Semakin banyak produk lokal yang dipromosikan makin besar peluang dikenal masyarakat		Kasi Pengembangan Perdagangan			
	Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	Jumlah pelaku usaha Produk lokal yang dipromosikan	Semakin banyak pelaku usaha produk lokal yang dipromosikan makin besar peluang dikenal masyarakat		Kasi Pengembangan Perdagangan			
Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	Hasil SKM menggambarkan kepuasan pedagang	Mengetahui tingkat kepuasan pedagang atas pelayanan yang diberikan pemerintah	Hasil Survey Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Hasil survey		
Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	Mengindikasikan kondisi bangunan pasar yang layak	Bangunan pasar yang layak dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli	Jumlah bangunan pasar yang layak x 100% Jumlah bangunan pasar di kabupaten	Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan Pembangunan pasar		
Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	Variasi Harga barang pokok dan penting	Mengetahui tingkat kenaikan harga barang pokok dan penting	Rata-rata Variasi Harga	Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Hasil Pendataan Harga Bapok		

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Makna Indikator	Penjelasan		Rumus Indikator	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
			Alasan Pemilihan Indikator	Alasan Penilaian Indikator				
Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun maupun diperbaiki	pemeliharaan dan pembangunan pasar bisa meningkatkan kelayakan pasar			Kepala Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan Pembangunan pasar	
Terlaksananya Keamanan, Keterlibatan dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	Melakukan pengawasan terhadap kehadiran petugas keamanan dilingkungan pasar	Dengan adanya pengawasan kehadiran petugas keamanan maka semakin teraturnya jadwal petugas keamanan			Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jadwal Kegiatan Petugas Keamanan	
	Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	Melakukan pengawasan terhadap kehadiran petugas kebersihan dilingkungan pasar	Dengan adanya pengawasan kehadiran petugas kebersihan maka semakin teraturnya jadwal petugas keamanan			Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jadwal Kegiatan Petugas Kebersihan	
Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Menyajikan Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Terlambatnya data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung			Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Data Penyewa Toko	
Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Memberikan informasi banyaknya hari yang digunakan dalam monitoring harga	Laporan Informasi Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting yang disajikan dan diupdate setiap harinya diharapkan dapat memberikan informasi terkini bagi masyarakat		Jumlah hari laporan informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting x 100 % Jumlah Target hari laporan	Kepala Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting	Laporan Hasil Pendataan harga	
Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	Memberikan Informasi Kinerja Realisasi Pupuk	Berapa Realisasi Kebutuhan Pupuk Kelompok Tani		Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Rencana Definitif Keberuan Kelompok Tani(RDKK) x 100 %	Kepala Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting	Dinas Pertanian	
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlingkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	Mengindikasikan alat ukur, timbangan dan perlingkapannya (UTTP) yang mempunyai tanda tera sah	Semakin banyak alat ukur, timbangan dan perlingkapannya (UTTP) yang mempunyai tanda tera sah maka terjaminnya kebenaran pengukuran, kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar ukuran, metode pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlingkapannya (UTTP)		Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah tahun berjalan x 100 % Target Alat UTTP tahun berjalan	Kepala Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan	Dokumen hasil tera/tera ulang	
	Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	Menggambarikan pelaku usaha metrologi legal yang memenuhi ketentuan	Melindungi konsumen agar tidak dirugikan terhadap barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan kesesuaian alat UTTP		Jumlah pelaku usaha bidang metrologi legal yang telah memenuhi ketentuan x 100 % Jumlah pelaku usaha bidang metrologi legal yang diawasi	Kepala Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan	Dokumen Pengawasan	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlingkapannya terhadap ketentuan berlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlingkapannya (UTTP) yang ditera bertanda tera sah	Menggambarikan Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlingkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	semakin banyak alat UTTP yang ditera maka terjaminnya kesukuratan alat tersebut			Kepala Seksi Kemetrologi	Laporan Hasil tera/tera ulang	
Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas kesesuaian barang dalam keadaan terbungkus dan keakuratan alat UTTP	semakin banyak barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan alat UTTP yang sesuai ketentuan maka mencegah kerugian konsumen			Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	Laporan Pengawasan	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perdagangan yaitu selisih antar tahun sebelumnya dan tahun berikutnya	Sebagai evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan		Nilai Kenaikan SAKIP = Nilai Tahun1- Nilai Tahun0 x 100% Nilai Tahun0	Sekretaris		
Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran merupakan selisih antara realisasi keuangan dengan PAGU anggaran dalam satuan persen	Realisasi Keuangan merupakan tolak ukur dari pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan		Nilai Tahun1 = Nilai SAKIP Tahun N Nilai Tahun0 = Nilai SAKIP Tahun N-1	Sekretaris		
Pelayanan Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Yang Tercatat	Mengindikasikan Penambahan Aset Pada Dinas Perdagangan	Pengadaan aset ditujukan untuk penambahan ekuitas guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana hingga diketahui jumlah aset yang menjadi milik Dinas Perdagangan		Jumlah Realisasi Keuangan x 100% Jumlah Pagu Anggaran Jumlah Pengadaan Aset x 100% Jumlah target Pengadaan Aset	Sekretaris		
	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	Mengindikasikan ASN yang memproses administrasi kepegawaian ASN	Agar diketahui berapa jumlah ASN di lingkungan Dinas Perdagangan yang pada tahun berjalan memproses pada tahun berjalan memproses administrasi kepegawaian		Jumlah ASN yang memproses administrasi x 100% Total Jumlah ASN yang memproses administrasi	Sekretaris		

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Sumber Data	Keterangan
		Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Rumus Indikator		
Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen kinerja yang dihasilkan pada tahun berjalan	Dokumen merupakan bukti nyata dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Dokumen adalah sebuah bentuk data-data tertulis. Dokumen juga adalah sumber resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi/pemerintah/lembaga lainnya untuk menjadi sebuah laporan		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
Menyusun Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	Jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan pada tahun berjalan	Dinas Perdagangan merupakan entitas dalam hal Laporan Keuangan, di dalam Laporan Keuangan menggambarkan keadaan awal dan akhir keuangan pada tahun berjalan, tidak hanya data keuangan saja namun mencakup aset yang dimiliki entitas.		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah Aset yang tercatat	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	Dokumen sarana dan prasarana Dinas Perdagangan merupakan bukti administrasi yang tercatat sehingga bisa diketahui pengklasifikasian sarana dan prasarana tersebut		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
Menyusun data Kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat tahun berjalan	Dokumentasi pelayanan surat menyurat dibuat agar diketahui seberapa banyak surat menyurat pada tahun berjalan		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib pada tahun berjalan	Pelayanan diberikan agar ASN dalam pengurusan administrasi seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, permohonan cuti dan lain-lain dapat diakomodir dengan tertib		Kasubag Umum dan Kepegawaian	

